

Determinan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat

Ilham Jaya Kusuma¹, Ali Anis²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: ijayakusuma21@gmail.com, alianis2911@yahoo.com

Info Artikel

Diterima:

18 November 2024

Disetujui:

3 Desember 2024

Terbit daring:

16 Desember 2024

DOI: -

Sitasi:

Kusuma, I J & Anis, Ali (2024).
Determinan Kesejahteraan
Masyarakat Provinsi Sumatera
Barat

Abstract:

This study aims to determine the effect of: (1) Education Sector Government Spending, (2) Health Sector Government Spending, (3) Investment, and (4) Income Distribution Disparity on Community Welfare. This research uses panel data analysis methods. The results in this study show that Government Expenditure in the Education Sector and Investment has a positive and significant effect on Community Welfare. Meanwhile, government expenditure in the health sector has a positive but insignificant effect on community welfare. Meanwhile, income distribution disparity has a negative but insignificant effect on community welfare.

Keywords: Education Sector Government Expenditure, Health Sector Government Expenditure, Investment, Income Distribution Disparity, Community Welfare

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, (2) Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, (3) Investasi, dan (4) Disparitas Distribusi Pendapatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Investasi berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Sementara itu Pengeluaran pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan Disparitas Distribusi Pendapatan berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan Masyarakat.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Investasi, Disparitas Distribusi Pendapatan, Kesejahteraan Masyarakat

Kode Klasifikasi JEL: H75, I25,

PENDAHULUAN

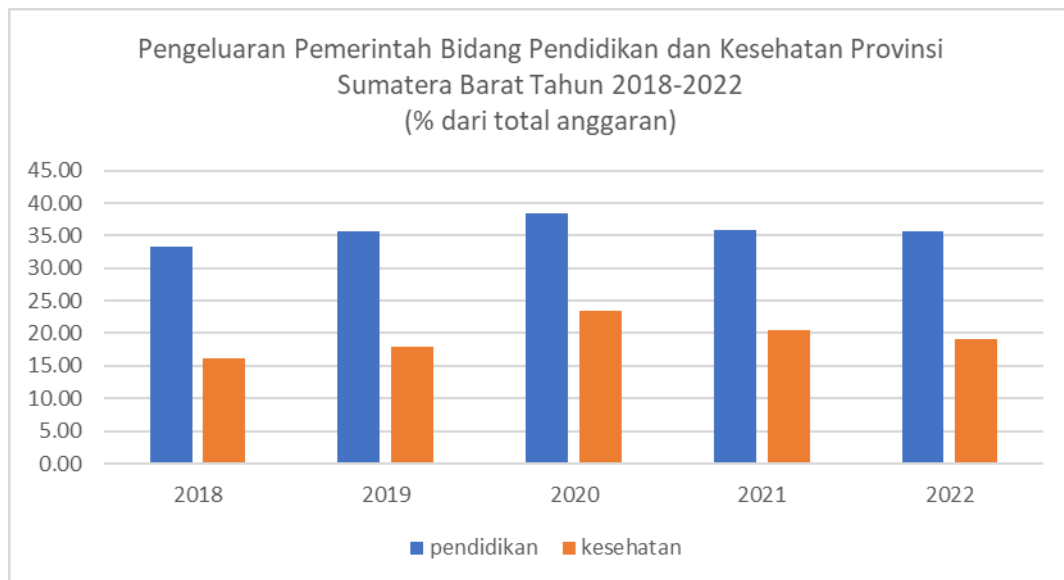
Setiap manusia mendambakan kondisi kehidupan yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil. Masalah kesejahteraan menyangkut kapabilitas seseorang memenuhi kebutuhan dasar serta menaikkan standar kehidupannya (Fadliyah & Triani, 2019). Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang sudah berada dalam kondisi sejahtera. Kesejahteraan diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman tentang pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan di berbagai sektor. (Primandani & Yasa, 2021).

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia menunjukkan perkembangan ekonomi yang bervariasi antar kabupaten/kota. Berdasarkan data BPS, terdapat kesenjangan PDRB yang cukup signifikan dimana Kota Padang mencatat PDRB tertinggi sebesar Rp 47,17 triliun pada tahun 2022, sementara Kota Padang Panjang memiliki PDRB terendah sebesar Rp 2,74 triliun. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemerataan pembangunan ekonomi di Sumatera Barat.

Seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, peran pemerintah semakin kompleks melalui anggaran daerah.

Anggaran berfungsi sebagai alat pengawasan atau kontrol atas pengeluaran dan pendapatan yang akan datang. Anggaran Daerah, yang juga dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah alat kebijakan utama yang digunakan oleh pemerintah daerah dan memainkan peran kunci untuk meningkatkan efektivitas dan kapasitas mereka.

Salah satu instrumen yang banyak digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan adalah kebijakan fiskal. Di antara instrumen kebijakan fiskal tersebut, terdapat instrument yang secara khusus terdapat dana atau anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk fasilitas umum termasuk transportasi, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain (Sasana, 2009). Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia, pengeluaran di sektor kesehatan diantisipasi dapat meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Mengalokasikan dana untuk pendidikan sangat penting karena dianggap sebagai salah satu pendorong utama ekspansi ekonomi. Dalam hal meningkatkan standar hidup, pendidikan sangatlah penting. Karena pendidikan adalah kunci untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan, tingkat pendidikan juga berdampak pada tingkat kemiskinan (De Silva & Sumarto, 2014).



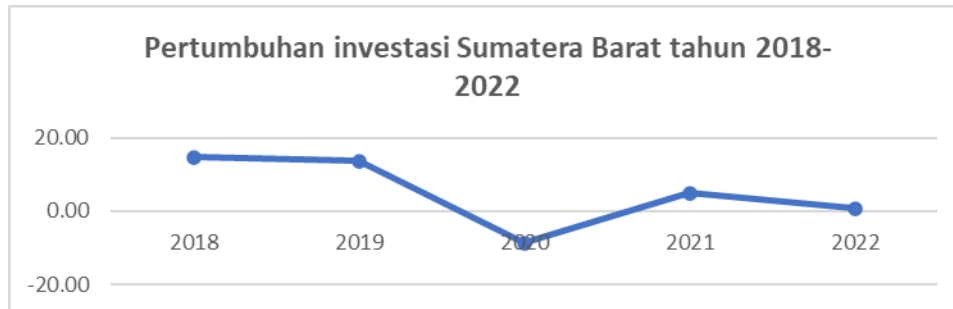
Grafik 1 (Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022)

Sumber: Kemenkeu (data diolah)

Data yang disebutkan di atas menggambarkan bagaimana pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan di provinsi Sumatera Barat meningkat secara bertahap antara tahun 2018 dan 2020, mencapai puncaknya pada tahun 2020, yaitu sebesar 38,40% dari keseluruhan anggaran. Selain itu, epidemi COVID-19 menyebabkan penurunan yang lambat pada tahun 2021 dan 2022, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan pendapatan daerah.

Kesejahteraan masyarakat seringkali dikaitkan dengan buah hasil dari investasi yang dilakukan pemerintah di beberapa sektor. Seiring dengan hal tersebut Zaris (1987) dan Wahyuni, dkk. (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa investasi swasta sangat penting dalam pola pembangunan daerah karena membantu menciptakan sektor-sektor di suatu daerah. Karena kegiatan investasi dapat menyerap banyak tenaga kerja, maka akan meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan pendapatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang pada akhirnya akan

mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kegiatan investasi di suatu daerah diharapkan akan berdampak pada laju Produk Domestik Regional Bruto yang kemudian akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

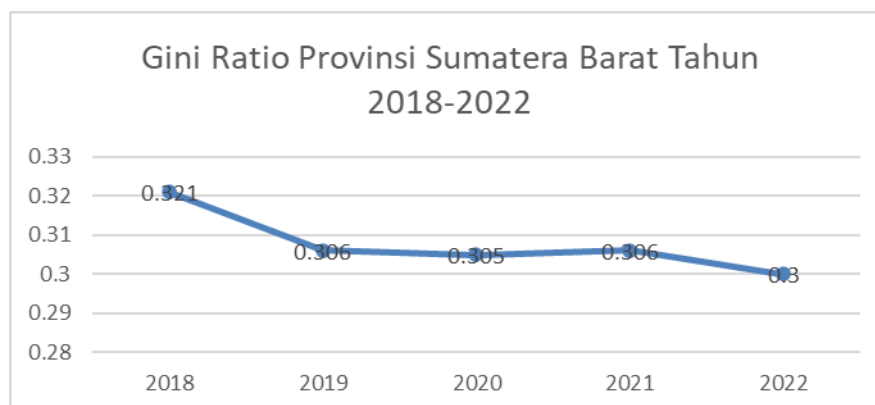


Grafik 2 (Pertumbuhan investasi Sumatera Barat tahun 2018- 2022)

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP (data diolah)

Grafik diatas menunjukkan pertumbuhan investasi Sumatera Barat dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan kecenderungan yang bervariasi, tetapi secara umum menurun setiap tahun, kecuali pada tahun 2021 yang meningkat 5,02% dibandingkan tahun 2020. Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah, yang bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi di semua sektor, terkait erat dengan peningkatan tahun 2021. Namun, karena sejumlah perusahaan besar tidak meningkatkan investasinya di Sumatera Barat dan program PEN yang tidak seketat tahun 2021, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 0,79% pada tahun 2022.

Pembangunan dalam sebuah pada umumnya tidak merata. Ada daerah yang pertumbuhannya cepat dan ada pula yang lambat. Pemerataan pendapatan adalah komponen penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan daerah. (I Komang Oka Artana Yasa & Sudarsana Arka, 2015). Pertumbuhan ekonomi akan terkena dampak negatif dari ketimpangan pendapatan, yang kemudian akan berakibat pada penurunan kesejahteraan penduduk lokal (Patta, 2012).



Grafik 3 (Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat 2018-2022)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) (data diolah)

Pada gambar menunjukkan grafik rasio gini Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 hingga 2022. Rasio gini provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2018, rasio gini mencapai 0,321. Angka ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup tinggi. Pada tahun 2019, rasio gini turun menjadi 0,306. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, rasio gini Kembali meningkat, masing-masing menjadi 0,305 dan 0,306. Selanjutnya, pada tahun 2022, rasio gini Kembali turun menjadi 0,280. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan.

Oleh karena itu, peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan fiskal yaitu realisasi belanja daerah dibidang pendidikan serta kesehatan, diperlukan dalam meningkatkan laju Produk Domestik Regioan Bruto (PDRB) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Selain kebijakan fiskal, terdapat faktor lain seperti investasi, dan distribusi pendapatan yang merata diduga mempengaruhi besar atau kecilnya laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan mengukur arah besarnya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, investasi, serta disparitas distribusi pendapatan terhadap Kesejahteraan Masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018-2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Kondisi kesejahteraan masyarakat terjadi ketika individu hidup dengan baik dalam hal kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan menggunakan berbagai metrik. Pendapatan masyarakat suatu wilayah akan meningkat seiring dengan pertumbuhannya ekonominya. Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan, yang menandakan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat juga akan mulai meningkat.

Tingkat pendapatan akan dipengaruhi oleh perubahan pengeluaran pemerintah dan pajak, menurut Dornbusch dan Fisher (1999). Hal ini membuat kebijakan fiskal lebih mungkin digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menstabilkan perekonomian.

Menurut Schultz (1961), salah satu elemen kunci dalam meningkatkan produktivitas ekonomi suatu negara adalah sumber daya manusianya. Penggunaannya meliputi pengeluaran langsung untuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan migrasi internal untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Menurut teori Harrod Domar, investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif. Artinya, ketika suatu daerah kekurangan investasi, maka pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan di daerah tersebut akan rendah karena tidak ada kegiatan ekonomi produktif yang terjadi, yang menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat. Menurut Hartini (2017), terdapat korelasi negatif antara ketimpangan distribusi pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Investasi memiliki dampak positif dan cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat, menurut Suciati (2015) dan Wahyuningsih (2012). Belanja langsung pemerintah dapat mendorong kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Alesina dan Rodric (dalam Sholihah et al., 2017) menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang kemudian akan berakibat pada penurunan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Yasa

(2015) dan Hipziwaty dkk. (2019) sampai pada kesimpulan bahwa terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan masyarakat dan ketimpangan distribusi pendapatan. Secara alamiah, adanya ketimpangan pendapatan regional akan mendorong daerah yang kurang berkembang untuk berusaha meningkatkan standar hidup mereka agar dapat mengejar ketertinggalan dari daerah sekitarnya dan memungkinkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dan induktif. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 2018 sampai 2022 dan data *cross-section* dari 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan dan, dinas penanaman modal dan PTSP. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, investasi dan disparitas distribusi pendapatan. Sedangkan pada variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel yang diolah menggunakan *evIEWS 10*. Berikut merupakan persamaan regresi data panel:

$$KM_{it} = \beta_0 + \beta_1(GSE)_{it} + \beta_2(GSH)_{it} + \beta_3(INV)_{it} + \beta_5(GINI)_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana KM merupakan Variabel terikat (Kesejahteraan Masyarakat), β_1 adalah Koefisien Regresi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, β_2 adalah Koefisien Regresi geluaran Pemerintah Sektor Kesejahtan, β_3 adalah Koefisien Regresi Investasi, β_4 adalah Infrastruktur Disparitas Distribusi Pendapatan.

Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh dari variabel pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan, investas, dan disparitas distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di provinsi sumatera barat tahun 2018 sampai 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada 19 kabupaten/kota, penelitian dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, investasi dan disparitas distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari hasil uji yang dilakukan menggunakan aplikasi *evIEWS 10* untuk metode data panel dan estimasi yang dilakukan dengan alat analisis regresi data panel, maka terpilihlah model *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut hasil estimasi yang didapat dengan menggunakan model FEM:

Tabel 1. (Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM))

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.945138	0.555134	8.908009	0.0000
PMPDD	0.147508	0.050000	2.950195	0.0044
PMKES	0.017989	0.026859	0.669758	0.5053
INVES	0.008704	0.003501	2.486241	0.0154
GINI	-0.112061	0.076863	-1.457932	0.1495
R-squared		0.998057		
F-statistic		1587.884		
Prob(F-statistic)		0.000000		

Sumber : *EvIEWS 10, 2024 (data diolah)*

Berdasarkan hasil regresi estimasi Fixed Effect Model pada tabel 1 maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{PDRB} = 4.95 + 0.15*\text{PMPDD} + 0.02*\text{PMKES} + 0.01*\text{INVES} - 0.11*\text{GINI}$$

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan Fixed Effect Model (FEM), ditemukan bahwa dari empat variabel independen yang diuji, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan investasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita dengan nilai koefisien masing-masing sebesar 0.147508 dan 0.008704 pada tingkat signifikansi 5%. Sementara itu, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan meskipun memiliki koefisien positif sebesar 0.017989 dan distribusi pendapatan yang memiliki koefisien negatif sebesar -0.112061 tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita. Model ini memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik dengan nilai R-squared sebesar 0.998057 atau 99.8%, yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi PDRB per kapita sebesar 99.8%, sedangkan sisanya 0.2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kelayakan model secara keseluruhan juga dikonfirmasi oleh nilai F-statistik sebesar 1587.884 dengan probabilitas 0.0000 yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95%.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan persamaan diatas menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X1) berpengaruh positif signifikan di 5% terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Provinsi Sumatera Barat dengan koefisien regresi 15%. Hal ini berarti setiap pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X1) mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka kesejahteraan masyarakat (Y) akan naik sebesar 15%.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah terhadap alokasi anggaran pendidikan dapat digunakan sebagai pengembangan kualitas pendidikan masyarakat, alokasi anggaran tersebut dapat digunakan untuk membangun fasilitas sekolah, melengkapi fasilitas pendidikan, memberikan beasiswa terhadap masyarakat kurang mampu yang ingin melanjutkan sekolah, serta anak-anak yang berprestasi. Sehingga kualitas pendidikan masyarakat akan menjadi meningkat maka akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Wahyuningsih, 2019), yang menyebutkan belanja publik terhadap alokasi pendidikan termasuk prinsip asas perkembangan, karena manusia termasuk dalam makhluk biologis dan berbudaya yang akan selalu membutuhkan makanan, pendidikan, dan kesehatan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) di Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X2) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Provinsi Sumatera Barat dengan koefisien regresi 2%. Hal ini berarti setiap pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X2) mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka kesejahteraan masyarakat (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 2%.

Pengeluaran pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, khususnya di sektor kesehatan. Semakin banyak uang yang dibelanjakan pemerintah untuk kesehatan, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain anggaran pemerintah, pengeluaran input juga berkontribusi terhadap peningkatan

permintaan agregat atau konsumsi. Agar peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan konsisten dengan kesejahteraan masyarakat umum. Namun demikian, kesejahteraan masyarakat tidak secara signifikan dipengaruhi oleh belanja kesehatan karena semakin banyak uang yang dibelanjakan pemerintah untuk perawatan kesehatan, maka semakin banyak orang yang pasti akan jatuh sakit; jika semakin banyak orang yang jatuh sakit, sumber daya manusia akan menurun, yang akan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia menurun maka akan memberikan dampak pada penurunan juga pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini mendukung penelitian Safitri Intan (2016), yang menemukan bahwa tidak ada hubungan yang nyata antara belanja kesehatan pemerintah dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh antara tahun 2008 dan 2014. Hubungan yang tidak searah ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk layanan kesehatan menurunkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Aceh.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi pemerintah di sektor kesehatan memiliki dampak positif dan dapat diabaikan terhadap pembangunan manusia mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak banyak dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan.

Pengaruh Investasi (X₃) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) di Provinsi Sumatera Barat

Selain itu, dengan koefisien regresi sebesar 1%, investasi (X₃) dan kesejahteraan masyarakat (Y) di Provinsi Sumatera Barat memiliki hubungan positif yang signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini mengimplikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat (Y) akan naik sebesar 1% jika setiap investasi (X₃) naik sebesar 1%. Menurut penelitian Sucanti (2015) dan Wahyuningsih (2012), terdapat hubungan yang baik antara investasi dan hasil ini.

Menurut teori investasi Harrod-Domar, investasi merupakan biaya yang akan meningkatkan kapasitas perekonomian untuk menghasilkan produk dan jasa serta permintaan efektif masyarakat. Akibatnya, peningkatan investasi domestik suatu wilayah akan menghasilkan penciptaan lapangan kerja baru sebagai hasil dari peningkatan kegiatan produksi yang memberikan masyarakat uang yang mereka butuhkan untuk memenuhi permintaan mereka.

Pengaruh Disparitas Distribusi Pendapatan (X₄) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) di Provinsi Sumatera Barat

Pada model, variabel disparitas distribusi pendapatan (X₄) di Provinsi Sumatera Barat memiliki dampak negatif yang tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Dengan koefisien regresi -11%, ini berarti bahwa jika disparitas distribusi pendapatan (X₄) meningkat sebesar 1%, kesejahteraan masyarakat (Y) akan menurun sebesar 11%, dan sebaliknya.

Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya (Gottschalk, 1997), yang menemukan bahwa upah rata-rata di Amerika Serikat tumbuh dengan pesat selama periode 1950-1960 tetapi dengan penyebarannya yang kecil. Namun, pada periode 1970an hingga 1990an polanya berbalik, pertumbuhan upah yang lambat menyebabkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Selain itu, menurutnya selama masyarakat miskin dapat mendapatkan lebih banyak uang daripada orang kaya, mereka yang

lebih kaya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akses yang adil ke hasil pembangunan seperti pendidikan dan pekerjaan diperlukan. Sari (2021) menemukan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DI Yogyakarta. Penelitian lain (Sunanda, 2017) menemukan bahwa PDRB juga memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan peningkatan PDRB menurunkan ketimpangan dan sebaliknya.

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki determinan kesejahteraan masyarakat di 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2018–2022. Menurut hasil penelitian, dari empat variabel independen yang diuji, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan investasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan, meskipun memiliki koefisien positif, dan distribusi pendapatan memiliki koefisien negatif, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita. Hasil estimasi menunjukkan bahwa ada beberapa kebijakan yang dapat dilaksanakan yang berfokus pada peningkatan alokasi dan efektivitas anggaran pendidikan. Ini karena pengaruhnya yang positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita, termasuk pengembangan infrastruktur pendidikan, peningkatan kapasitas tenaga pengajar, dan meningkatkan akses ke pendidikan di daerah tertinggal.

Meskipun pengaruh sektor kesehatan dan distribusi pendapatan tidak signifikan, tetap diperlukan upaya peningkatan efektivitas program kesehatan serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif. Kebijakan-kebijakan tersebut perlu diintegrasikan dan diselaraskan dengan kebutuhan pasar kerja serta didukung sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

REFERENSI

- Barat, D. I. S. (N.D.). *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat Oleh : Irdas Fitri, Efrizal Syofyan, Hasdi Aimon.*
- De Silva, I., & Sumarto, S. (2014). Does Economic Growth Really Benefit The Poor? Income Distribution Dynamics And Pro-Poor Growth In Indonesia. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 227–242. <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.938405>
- Destiningsih, R., Afiftah, A. T., & Juliprijanto, W. (2017). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1988-2017. *Ekonomi*, 1(2), 11–22.
- Fadliyah, C., & Triani, M. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan Dan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 789–796. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7706>
- I Komang Oka Artana Yasa, & Sudarsana Arka. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8 (1), 63–71.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analysis Of Factors Influencing The Welfare Of The People Of Padang City. (In Indonesian). *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67–83.

- Muslihatinningsih, F., Alvidiar, C., & Niken Wilantari, R. (2023). Apakah Pengeluaran Pemerintah Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 8(1), 138–149. <https://doi.org/10.29407/Jae.V8i1.19806>
- Patta, D. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia*. Universitas Hassanudin.
- Primandani, N. P. I., & Yasa, I. N. M. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ep Unud*, 10(5), 2070–2100.
- Sasana, H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 103–124.
- Schultz, T. W. (1961). Investment In Human Capital. *The American Economic Review*, 51, 1–17. <https://about.jstor.org/terms>
- Widodo, A., & Johanna Maria, Dan K. (2011). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah*. 1, 25–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/Jdep.1.1.25-42>
- Zaris, R. (1987). *Prespektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Lpfe Ui.